

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2018



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 2 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone bidang Perhubungan dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tata Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone merupakan salah satu Dinas Teknis Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 dan bertanggung jawab kepada bupati dalam pelaksanaan tugas Pemerintah dan Pelayanan di bidang Perhubungan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Bone 2013-2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun 2018 ini disusun untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program - program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menjamin agar terciptanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program tahunan serta menjadi pedoman dan acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2018;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2018;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Tahun 2018.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan

baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai : faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Terdapat dua puluh dua (22) kegiatan yang menjadi garapan wajib Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dinas : **"MEWUJUDKAN LAYANAN TRANSPORTASI YANG AMAN DAN BERKUALITAS "**. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam rangka pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada kegiatan ini terdapat anggaran yang terdiri dari anggaran belanja telepon dan listrik yang dialokasikan dana sebesar Rp. 49.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.948.960,- atau dengan kata lain dana terserap sebesar 93,77% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.051.040,-.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini merupakan pendukung dalam rangka penataan administrasi umum dan keuangan untuk mencapai tertib administrasi dan kesejahteraan aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Pada kegiatan tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 107.940.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 107.940.000,- atau dengan kata lain dana terserap sebesar 100% atau kegiatan fisik terlaksana 100%.

3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran maka, pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 8.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 7.965.000,- atau 99,56% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 35.000,-.

4. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah & Luar Daerah

Dalam rangka memperlancar koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas yang akan dan telah dilaksanakan, baik dalam maupun luar daerah. Maka, pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 245.400.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 245.393.000,- atau 99,99% atau kegiatan fisik terlaksana 100%.

5. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 50.375.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 50.373.500,- atau 100% dengan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.500,-.

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran gedung kantor yang layak pakai.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 11.086.500,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 11.086.500,- atau 100%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran kendaraan dinas yang layak pakai. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 139.938.500,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 139.730.863,- atau 99,85%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran peralatan elektronik yang layak pakai. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 7.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100%.

9. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran terwujudnya pelatihan dan bimbingan teknis guna tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas di bidangnya masing-masing. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 20.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%.

10. Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan ini merupakan kegiatan Penyusunan rencana pembangunan yang berbasis data Rumah Tangga Sasaran Miskin dengan sasaran Masyarakat Miskin. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 15.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%.

11. Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran tersedianya data analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 60.200.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 59.795.000,- atau 99,32% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 405.000,-.

12. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran terlaksananya sosialisasi Perda Andalalin. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 65.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 50.600.000,- atau 99,64% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 14.000.000,-.

13. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Dalam rangka peningkatan pengelolaan terminal dibidang Angkutan Darat. Maka, pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 432.582.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 432.582.000,- atau 100%.

14. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 49.750.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 49.750.000,- atau 100%.

15. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light

Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi / pemeliharaan traffic light di wilayah Kabupaten Bone, maka perlu dialokasikan dana sebesar Rp. 33.600.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 33.600.000,- atau 100%.

16. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 46.643.000,- atau 93,28% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.357.000,-.

17. Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 60.000.000,- dengan pencapaian realisasi

anggaran sebesar Rp. 59.955.000,- atau 99,92% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 45.000,-.

18. Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan, maka perlu dialokasikan dana sebesar Rp. 60.500.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 60.437.000,- atau 99,89% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 63.000,-.

19. Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Keselamatan Transportasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran pemeliharaan Speed Boat, maka perlu dialokasikan dana sebesar Rp. 98.731.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 98.731.000,- atau 100%

20. Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pada kegiatan ini perlu dialokasikan dana sebesar Rp. 50.969.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 50.967.000,- atau 100%.

21. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan

Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan (pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Pada kegiatan ini perlu dialokasikan dana sebesar Rp. 110.028.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 109.480.000,- atau 99,50% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 548.000,-.

22. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan sasaran terbentuknya Perda yang berdasarkan pada ketentuan nasional. Pada kegiatan ini perlu dialokasikan dana sebesar Rp. 174.900.000,- dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 174.757.000,- atau 100%.

Secara keseluruhan belanja langsung dari anggaran yang telah ditetapkan di DPA-SKPD adalah Rp. 1.900.000.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*) dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 1.877.735.223,- atau 98,82%, sisa dana sebesar Rp. 22.264.777,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai setelah perubahan : Rp. 3.285.607.067,- terealisasi
Dana sebesar sesuai DPPA : Rp. 3.605.696.000,-
Selisih sebesar : Rp. 320.088.933,-
- b. Belanja Langsung : Rp. 1.877.735.223,- terealisasi
Dana sebesar : Rp. 1.900.000.000,-
Sisa anggaran sebesar : Rp. 22.267.777,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Sasaran Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR	2017		% Capaian Target
			TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif.	Jumlah pelabuhan/terminal bis.	1 Unit	1 Unit	100
2.	Terlaksananya sarana dan prasarana transportasi sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan dukungan yang maksimal bagi perekonomian masyarakat Kab. Bone.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.402 Orang	32.880 Orang	2.345,22
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KEUR).	6 bulan	6 bulan	100
		Pemasangan rambu-rambu pada titik rawan kecelakaan.	50 Unit	50 buah	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	2017		% Capaian Target
			TARGET	REALISASI	
3.	Meningkatnya profesionalisme pegawai yang mampu mengembangkan potensi diri yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan.	Jumlah uji KEUR angkutan	3.804 Buah	2.197 Buah	57,75
4.	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat.	Rasio izin trayek per jumlah penduduk.		0,003	
		Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	2 Kegiatan	-	

b. Capaian Kinerja Program

Tabel 2.2 Target dan Capaian Kinerja Program

No.	Sasaran / Program / Kegiatan	Tahun 2017 (Rp.)		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik
Sasaran 1 :				
<i>Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efisien dan efektif.</i>				
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	460.715.000	457.620.860	99,32%
				100%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000	45.948.960	93,77%
				100%
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.940.000	107.940.000	100%
				100%
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	8.000.000	7.965.000	99,56%
				100%
4.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	245.400.000	245.393.400	99,96%
				100%
5.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	50.375.000	50.373.500	99,94%
				100%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	158.025.000	157.817.363	99,86%
				100%
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11.086.500	11.086.500	100%
				100%

2.	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	139.938.500	139.730.863	99,85%
				100%
3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.000.000	7.000.000	100%
				100%
III.	Program Pengembangan Data / Informasi	15.000.000	15.000.000	100%
				100%
1.	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	15.000.000	15.000.000	100%
				100%

Sasaran 2 :

Terlaksananya sarana dan prasarana transportasi sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan dukungan yang maksimal bagi perekonomian masyarakat Kab. Bone.

IV.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	557.782.000	542.977.000	97,34%
				100%
1.	Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	60.200.000	59.795.000	99,32%
				100%
2.	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	65.000.000	50.600.000	77,84%
				100%
3.	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	432.582.000	432.582.000	100%
				100%
V.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	110.028.000	109.480.000	99,50%
				100%
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	110.028.000	109.480.000	99,50%
				100%

VI.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	83.350.000	83.350.000	100%
				100%
1.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	49.750.000	49.750.000	100%
				100%
2.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light	33.600.000	33.600.000	100%
				100%

Sasaran 3 :

Meningkatnya profesionalisme pegawai yang mampu mengembangkan potensi diri yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan.

VII.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	20.000.000	100%
				100%
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	20.000.000	100%
				100%

Sasaran 4 :

Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat.

VIII.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	320.200.000	316.733.000	98,91%
				100%
1.	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	50.000.000	46.643.000	93,28%
				100%
2.	Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	60.000.000	59.955.000	99,92%
				100%
3.	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	60.500.000	60.437.000	99,89%

				100%
4.	Monitoring dan Sosialisasi Keselamatan Transportasi	98.731.000	98.731.000	100%
				100%
5.	Monitoring dan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	50.969.000	50.967.000	100%
				100%
IX.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	174.900.000	174.757.000	99,91%
				100%
1.	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	174.900.000	174.757.000	99,91%
				100%
JUMLAH		1.900.000.000	1.877.735.223	98,82%
				100%

c. Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas

No.	Uraian	Target 2017 (Rp)	Realisasi 2017	
			Rp	%
1.	Kinerja Anggaran	1.900.000.000	1.877.735.223	98,82
2.	Kinerja Pendapatan Dinas	978.480.000	869.756.000	88,88

2.3 -Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

- a. Keselamatan lalu lintas
- b. Penurunan harga Bahan Bakar Minyak
- c. Kelembagaan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas : Usulan Kegiatan Pengadaan Marka Jalan diusulkan oleh Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur;
2. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas : Usulan Kegiatan Pemasangan Guard Rail diusulkan oleh Desa Pasempé Kecamatan Palakka;
3. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas : Usulan Kegiatan Pemasangan Cermin Tikungan diusulkan oleh Kecamatan Tellu LimpoE dan Kecamatan Bontocani;
4. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas : Usulan Kegiatan Pengadaan Paku Jalan diusulkan oleh Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang

- Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan.

c. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berikut ini SPM bidang perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian
			Indikator		
1	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	96%	2018
			2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	100%	2018
	2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	13%	2018	

			4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	88%	2018
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	91%	2018
		4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	100%	2018
		5 Sumber Daya Manusia (SDM)	7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	25%	2018
			8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	33%	2018
			9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	50%	2018
			10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	33%	2018
		6 Keselamatan	11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	2018
2	Angkutan Sungai dan Danau	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	12 Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	65%	2018

			13 Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	57%	2018
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	14 Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	66%	2018
		3 Keselamatan	15 Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	65%	2018
		4 Sumber Daya Manusia (SDM)	16 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	40%	2018
3	Angkutan Penyeberangan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	17 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	33%	2018
			18 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	53%	2018
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	19 Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.		2018

4	Angkutan Laut	3	Keselamatan	20	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota		2018	
		4	Sumber Daya Manusia (SDM)	21	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota		2018	
		1	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	22	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.		2018	
					23	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.		2018
	2	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	24	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.		2018		
	3	Keselamatan	25	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	86%	2018		
		4	Sumber Daya Manusia (SDM)	26	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	86%	2018	
5	Angkutan Udara	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Udara	27	Tersedianya pesawat yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur penerbangan.	20%	2018	

		28	Tersedianya Angkutan Pemandu Moda di bandar udara Bone.	0%	2018
2	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	29	Tersedianya Terminal Penumpang di Bandar Udara.	0%	2018
		30	Tersedianya Terminal Kargo di Bandar Udara.	0%	2018
		31	Tersedianya Bangunan Ibadah dan Kantin Penumpang dan Pengemudi di Bandar Udara.	0%	2018
3	Keselamatan	32	Terpenuhinya standar keselamatan bagi pesawat yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dan Propinsi.	50%	2018
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	33	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi dalam bidang kebandarudaraan.	0%	2018

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bone akan turut aktif dalam hal perencanaan pembangunan. Berdasarkan pada Renja Dinas Perhubungan maka tujuan dari Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone pada tahun 2018 yaitu:

1. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia bidang perhubungan.
2. Penetapan kebijakan tataran perizinan bidang perhubungan.
3. Penetapan keterpaduan intra dan antar moda Kabupaten.
4. Peningkatan pengendalian, pengawasan angkutan umum.
5. Menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

Adapun Sasaran Yang Akan Dicapai Adalah :

1. Peningkatan kualitas baik dan pelayanan kepegawaian dan masyarakat, pengelolaan anggaran serta penciptaan budaya kerja aparatur yang baik dan berkeadilan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam rangka pemutakhiran data-data spesifik.
4. Terwujudnya sarana publik yang terpelihara.
5. Terwujudnya ketertiban pengguna transportasi.
6. Berkurangnya angkutan umum/barang yang ilegal.
7. Tingkat kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi.
8. Data informasi yang akurat, aktual senantiasa tersedia dalam data base, dan setiap saat dapat di akses.

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone adalah sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah tentang Retribusi, ketertiban Kendaraan Bermotor di kawasan wilayah Kabupaten Bone. Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bone melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	Sumber Dana
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		689.806.950	
1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Layanan Listrik dan Telepon	59.377.500	DAU
2	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Honorarium PPTK, Honorarium Tim Pengelola Keuangan	115.857.000	DAU
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Surat Kabar dan Majalah	8.820.000	DAU
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Keikutsertaan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	420.000.000	DAU
5	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Alat Tulis kantor dan Jasa Foto Copy dan Biaya makan dan minum	85.752.450	DAU
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		264.390.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas Roda Dua	33.075.000	DAU
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	21.262.500	DAU
3	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	16.537.500	DAU
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	22.050.000	DAU
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	163.747.500	DAU
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	7.717.500	DAU
III.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		45.281.250	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas	45.281.250	DAU
IV.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		16.537.500	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan	16.537.500	DAU

V.	Pembangunan Data/Informasi		26.971.875	
1	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Tersedianya database kemiskinan yang partisipatif	26.971.875	DAU
VI.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		553.521.000	
1	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	55.125.000	DAU
2	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terlaksananya kegiatan pengelolaan terminal angkutan darat	333.396.000	DAU
3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tercapainya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	165.000.000	DAU
VII.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		122.419.500	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor	61.582.500	DAU
2	Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light	Traffic Light terpelihara dan berfungsi dengan baik	60.837.000	DAU
VIII.	Peningkatan Pelayanan Angkutan		300.420.912	
1	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terlaksananya Pemeriksaan Pengemudi Angkutan Umum dan Rum Check	69.867.000	DAU
2	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Tersedianya Hasil Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	110.000.000	DAU
3	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Tersedianya Media Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat	53.392.500	DAU
4	Monitoring dan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	67.161.412	DAU

IX	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		217.302.750	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Rambu - Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Warning Light & Cermin Tikungan	217.302.750	DAU
XI.	Peningkatan dan pengamanan lalu lintas		3.918.100.000	
1	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	Rambu - Rambu Lalu Lintas	165.000.000	DAK
2	Pengadaan Marka Jalan	Marka Jalan & Zona Selamat Sekolah	715.000.000	DAK
3	Pengadaan Guard Rail	Guard Rail	264.000.000	DAK
4	Pengadaan Paku Jalan	Paku Jalan	56.100.000	DAK
5	Pengadaan APILL	APILL	715.000.000	DAK
6	Pengadaan Cermin Tikungan	Cermin Tikungan	58.000.000	DAK
7	Pengadaan Road Barrier	Road Barrier	350.000.000	DAK
8	Pengadaan Jembatan Penyeberangan	Jembatan Penyeberangan	1.500.000.000	DAK
9	Pengadaan Reviter	Reviter	75.000.000	DAK
10	Pengadaan Alat Komunikasi (Handy Talky)	Handy Talky	20.000.000	DAK
XII.	Penataan Peraturan Perundang-undangan		200.000.000	
1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Ranperda Pengendalian Angkutan Barang & Orang	200.000.000	DAU
JUMLAH			5.801.230.737	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan di bidang Perhubungan sebagai wujud nyata dan tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Dinas Perhubungan Kabupaten Bone selama kurun waktu Satu tahun, disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Bone, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018. Adapun fungsi dari Renja tahun 2018 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2018, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bone kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Watampone, September 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BONE**



Drs. ASISWA

Pangkat : Pembina Utama Muda
: 19640830 199205 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BONE TAHUN 2018**

Kode (1)	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (3)	Rencana Tahun 2018		Catatan Penting (8)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)		Kebutuhan Dana/pagu indikator (6)	Sumber Dana (7)	Target Capaian (9)	Kebutuhan Dana/pagu indikator (10)
	Perhubungan								
	Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Listrik dan Telepon							
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium PPTK, Honorarium Tim Pengelola Keuangan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	689.806.950	APBD		100%	758.490.645
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar dan Majalah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	59.377.500	APBD		100%	65.315.250
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Honorarium PPTK, Honorarium Tim Pengelola Keuangan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	115.857.000	APBD		100%	127.145.700
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Surat Kabar dan Majalah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	8.820.000	APBD		100%	9.702.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	420.000.000	APBD		100%	462.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Alat Tulis kantor dan Jasa Foto Copy dan Biaya makan dan minum	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	85.752.450	APBD		100%	94.327.695
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Alat Tulis kantor dan Jasa Foto Copy dan Biaya makan dan minum	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	264.390.000	APBD			290.829.000
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kendaraan dinas Roda Dua	Kecamatan Tanete Riattang Barat	5 Unit	33.075.000	APBD		100%	36.382.500
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	5 Unit	21.262.500	APBD		100%	23.388.750
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya mebeleur	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	16.537.500	APBD		100%	18.191.250
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	22.050.000	APBD		100%	24.255.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kecamatan Tanete Riattang Barat	Bus Sekolah 2 Unit, Mobil 3	163.747.500	APBD		100%	180.122.250
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	Komputer dan Printer 6 unit, Mesin Ketik 2 unit, AC 7 unit	7.717.500	APBD		100%	8.489.250

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (3)	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting (8)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (6)		Sumber Dana (7)	Target Capaian (9)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				45.281.250			49.809.375
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas	Kecamatan Tanete Riattang Barat	5 Orang	45.281.250		100%	49.809.375
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				16.537.500			18.191.250
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan	Kecamatan Tanete Riattang Barat		16.537.500		100%	18.191.250
	Pengembangan Data / Informasi				26.971.875			29.669.062
	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya database kemiskinan yang partisipatif	Kecamatan Mare	100%	26.971.875		100%	29.669.062
	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				553.521.000			608.873.100
	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	55.125.000		100%	60.637.500
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Terlaksananya kegiatan pengelolaan terminal angkutan darat	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	333.396.000		100%	366.735.600
	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tercapainya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	165.000.000		100%	181.500.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				122.419.500			134.661.450
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	5 Unit	61.582.500		100%	67.740.750
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light	Traffic Light terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kecamatan Tanete Riattang Barat	5 Unit	60.837.000		100%	66.920.700

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Pelayanan Angkutan				300.420.912				330.463.003
	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Terlaksananya Pemeriksaan Pengemudi Angkutan Umum dan Rum Check	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	69.867.000	APBD		100%	76.853.700
	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Tersedianya Hasil Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	Bus Sekolah 2 Unit, Mobil 3 Unit	110.000.000	APBD		100%	121.000.000
	Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Tersedianya Media Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat	Kecamatan Tanete Riattang Barat	Bus Sekolah 2 Unit, Mobil 3 Unit	53.392.500	APBD		100%	58.731.750
	Monitoring dan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	Kecamatan Tanete Riattang Barat		67.161.412	APBD		100%	73.877.553
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				217.302.750				239.033.025
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Rambu - Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Warning Light & Cermin Tikungan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	217.302.750	APBD		100%	239.033.025
	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas				3.918.100.000				4.309.910.000
	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rambu-rambu Lalu Lintas	Kabupaten Bone	100%	165.000.000	APBD		100%	181.500.000
	Pengadaan Marka Jalan	Marka Jalan	Kabupaten Bone	100%	715.000.000	APBD		100%	786.500.000
	Pengadaan Guard Rail	Guard Rail	Kabupaten Bone	100%	264.000.000	APBD		100%	290.400.000
	Pengadaan Paku Jalan	Paku Jalan	Kabupaten Bone	100%	56.100.000	APBD		100%	61.710.000
	Pengadaan Apil	APILL	Kabupaten Bone	100%	715.000.000	APBD		100%	786.500.000
	Pengadaan Cermin Tikungan	Cermin Tikungan	Kabupaten Bone	100%	58.000.000	APBD		100%	63.800.000
	Pengadaan Road Barrier	Road Barrier	Kabupaten Bone	100%	350.000.000	APBD		100%	385.000.000
	Pengadaan Jembatan Penyeberangan	Jembatan Penyeberangan	Kabupaten Bone	100%	1.500.000.000	APBD		100%	1.650.000.000
	Pengadaan Reviter	Reviter	Kabupaten Bone	100%	75.000.000	APBD		100%	82.500.000
	Pengadaan Alat Komunikasi (Handy Talky)	Handy Talky	Kabupaten Bone	100%	20.000.000	APBD		100%	22.000.000
	Penataan Peraturan Perundang-undangan				200.000.000				220.000.000
	Legislasi/rancangan peraturan perundang-undangan	Ranperda Pengendalian Angkutan Barang & Orang	Kabupaten Bone	100%	200.000.000	APBD		100%	220.000.000
JUMLAH					5.801.230.737				6.391.056.810

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Peningkatan Pelayanan Angkutan				300.420.912				330.463.003	
	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Terlaksananya Pemeriksaan Pengemudi Angkutan Umum dan Rum Check	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	69.867.000	APBD		100%	76.853.700	
	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Tersedianya Hasil Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	Bus Sekolah 2 Unit, Mobil 3 Unit	110.000.000	APBD		100%	121.000.000	
	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Tersedianya Media Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat	Kecamatan Tanete Riattang Barat	Bus Sekolah 2 Unit, Mobil 3 Unit	53.392.500	APBD		100%	58.731.750	
	Monitoring dan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	Kecamatan Tanete Riattang Barat		67.161.412	APBD		100%	73.877.553	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				217.302.750				239.033.025	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Rambu - Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Warning Light & Cermin Tikungan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	217.302.750	APBD		100%	239.033.025	
	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas				3.918.100.000				4.309.910.000	
	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rambu-rambu Lalu Lintas	Kabupaten Bone	100%	165.000.000	APBD		100%	181.500.000	
	Pengadaan Marka Jalan	Marka Jalan	Kabupaten Bone	100%	715.000.000	APBD		100%	786.500.000	
	Pengadaan Guard Rail	Guard Rail	Kabupaten Bone	100%	264.000.000	APBD		100%	290.400.000	
	Pengadaan Paku Jalan	Paku Jalan	Kabupaten Bone	100%	56.100.000	APBD		100%	61.710.000	
	Pengadaan Apil	APILL	Kabupaten Bone	100%	715.000.000	APBD		100%	786.500.000	
	Pengadaan Cermin Tikungan	Cermin Tikungan	Kabupaten Bone	100%	58.000.000	APBD		100%	63.800.000	
	Pengadaan Road Barrier	Road Barrier	Kabupaten Bone	100%	350.000.000	APBD		100%	385.000.000	
	Pengadaan Jembatan Penyeberangan	Jembatan Penyeberangan	Kabupaten Bone	100%	1.500.000.000	APBD		100%	1.650.000.000	
	Pengadaan Reviter	Reviter	Kabupaten Bone	100%	75.000.000	APBD		100%	82.500.000	
	Pengadaan Alat Komunikasi (Handy Talky)	Handy Taiky	Kabupaten Bone	100%	20.000.000	APBD		100%	22.000.000	
	Penataan Peraturan Perundang-undangan				200.000.000				220.000.000	
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Ranperda Pengendalian Angkutan Barang & Orang	Kabupaten Bone	100%	200.000.000	APBD		100%	220.000.000	
		JUMLAH			6.354.751.737				6.989.929.910	